



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
UNIT KERJA : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PROF. DR. AGUSTINUS FATEM, MT
2. Jabatan : ANGGOTA KASN
3. NHK : 778278

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.797.719.900

1. Tanah Seluas 275 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 393.750.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/327 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/300 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 1.377.507.400
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 550.462.500
5. Tanah Seluas 426 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 426.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 401.304.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.804.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 86.750.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.129.763.664



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.415.537.564
III. HUTANG	Rp.	225.060.600
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.190.476.964

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.